

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



DINAS KETAHANAN PANGAN



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI GEDUNG D LANTAI 2
JALAN WOLTER MONGINSIDI Tenggarong**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayahnya semata sehingga "Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara" Tahun Anggaran 2023 ini dapat disusun.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 belum sempurna, untuk itu di harapkan kritik dan sarannya, agar pada masa mendatang dapat lebih disempurnakan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada semua semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Renja Dinas Ketahanan Pangan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2023, sekaligus sebagai landasan pijakan guna penyusunan program dan kegiatan pada tahun – tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, 10 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas



Wiyono, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690204 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra PD Tahun 2023.....	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan	35
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
4.1. Program dan Kegiatan.....	38
V. PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu Pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 mengacu pada Sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini disusun secara bersinergi dan terintegrasi antara prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (Satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berlatar belakang amanat dimaksud, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang

bertugas membantu Bupati dalam Perumusan Kebijakan Daerah Terkait Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Nomor: 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas Ketahanan Pangan akan melaksanakan segenap proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya dengan harga yang terjangkau.

Mengingat begitu strategisnya peranan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara serta seiring untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan bahagia." Juga sejalan dengan Visi Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan yaitu "Untuk Mewujudkan Pertanian Tangguh, Pemantapan Ketahanan Pangan, Serta sesuai arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan tahun 2020-2024 " Pemantapan Ketahanan Pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan" maka Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai **misi 2 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya**, maka perlu disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, maka Renja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari program Dinas Ketahanan Pangan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan.
2. Renja Dinas Ketahanan Pangan merupakan acuan Dinas Ketahanan Pangan untuk memasukkan program/kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) tahun 2023.
3. Renja Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yaitu untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka tahapan penyusunan dan penetapannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.
3. Program/kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program/kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program/kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja keluaran (output), indikator kinerja hasil (outcome) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara, (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2023.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 mempunyai tujuan :

- a. Memberikan acuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasarannya.

- b. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah agar subsansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB.II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB.V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2022.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan menganggarkan sebesar Rp. 10.396.482.445,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.601.359.094 atau 92,35%, dari total alokasi yang ada. Tabel berikut adalah pagu anggaran yang dianggarkan beserta realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
			(Rp)	(Rp)	
1	Percepatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP)	8.163.486.445	7.406.970.123	90,73
2	Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan)	1.691.996.000	1.669.996.971	98,70
3	Pemenuhan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)	276.000.000	274.050.000	99,29
4	Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I	91.000.000	89.592.500	98,45
5	Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi (Persen)	174.000.000	160.749.500	92,38
JUMLAH			10.396.482.445	9.601.359.094	92,35

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara serta Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat Tabel (TC 29) sebagai berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah da
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja-PD Tahun 2021	Realisasi Renja-PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
1	Bidang Ketahanan Pangan									
0,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,00	76,98	78,00	76,01	97,44	78	78	100,00%
000.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	82 Dokumen	65 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	17 Dokumen	82 Dokumen	100,00%
000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan (Renja, RKA/DPA, RKAP/DPPA), RENSTRA	22 Dokumen	15 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	22 Dokumen	100,00%
000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dibuat (LPPD, LKJIP, Laptah, LKPJ, LKPD)	35 Dokumen	30 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	35 Dokumen	100,00%
000.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi Berkala dan akhir Tahun	25 Dokumen	20 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	25 Dokumen	100,00%
000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	72 Dokumen	60 Dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	72 Dokumen	100,00%
000.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	72 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	72 Bulan	100%
000.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Dokumen	60 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	72 Dokumen	100%
000.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	72 Dokumen	60 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	72 Dokumen	100,00%
000.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi BMD dengan Keuangan	72 Dokumen	60 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	72 Dokumen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja-PD Tahun 2021	Realisasi Renja-PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
000.01.2.06.C2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan, dan Peralatan kantor	240 Jenis dan 74 Unit	186 Jenis dan 30 Unit	40 Jenis dan 3 Unit	40 Jenis dan 3 Unit	100%	40 Jenis dan 3 Unit	226 jenis dan 33 Unit	82,48%
000.01.2.06.C4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	114 Jenis	0	0	0	0,00%	0 Jenis	0	0,00%
000.01.2.06.C5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	77 Jenis	33 Jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	36 Jenis	50,00%
000.01.2.06.C9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Facat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	25000/H	1800 OH	250 O/H	250 O/H	100%	250 O/H	2050	82,00%
000.01.2.06.10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPFA) serta pada unit kearsipan (LK)	2 unit	2 unit	1 Unit	1 unit	100%	1 Unit	3 Unit	150,00%
000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	72 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	72 Bulan	100,00%
000.01.2.08.C2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya	72 Bulan	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	80%	12 Bulan	84	116,67%
000.01.2.08.C3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diservice	36 Jenis	36 Jenis	30 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	42 Jenis	116,67%
000.01.2.08.C4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	174 orang 12 Bulan	138 orang 12 Bulan	26 12Bulan	26 12 Bulan	100%	26 12 Bulan	164 Orang 12 Bulan	94,25%
000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	36 Unit	30 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	36 Unit	100,00%
000.01.2.09.C1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Mendapat Perawatan	12 Unit Mobil	10 Unit	2 Unit Mobil	2 Unit Mobil	100%	2 Unit Mobil	12 Unit	100,00%
000.01.2.09.C2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Dua, Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda Empat	24 Unit Mobil	20 Unit Mobil	24 Unit Roda Dua, 4 Unit Empat	24 Unit Roda Dua, 4 Unit Empat	100%	24 Unit Roda Dua, 4 Unit Empat	24 Roda 2, 24 Roda 4	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja-PD Tahun 2021	Realisasi Renja-PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
2.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama (beras);	135,04%	128,82	135,04%	148,00	109,60	135,04	148,00	109,60
		Ketersediaan Energi dan protein:								
		- Ketersediaan energi	2.387,00		2.387,00	2.856,00	119,65	2.856,00	2.856,00	119,65
		- Ketersediaan Protein	80,21		80,21	102,60	127,91	102,60	102,60	127,91
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	4 Unit	7 Unit	100,00
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat	6 Unit	3 Unit	0	0	0%	4	7	117%
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Terbangunnya Lantai Jemur Lumbung Pangan masyarakat	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%	1	1 Unit	100%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Score Pola Pangan harapan	97,15	75,7	82,00	81,30	99,15	82	81,30	99,15
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	<10	0,8	5,00	1,30	100%	5	1,30	100%
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Dokumen Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	6 dokumen	5 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	7 dokumen	116,67
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Stock Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	8Dok	2 Dokumen	2Dokumen	100%	2 dokumen	10 Dok	83,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja-PD Tahun 2021	Realisasi Renja-PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan cadangan Pangan Pemerintah	50%	100%	35%				35%	100
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah daerah	150 Ton	156 Ton	130 Ton	128 Ton	98%	128ton	284	189,33
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Score AngkaKecukupan energi dan protein : - Anka Kecukupan energi - Angka Kecukupan Protein	2150 Kkal 57	1689 54,7	2050 57	1984 58,9	97% 103%	2150 55,5	2150 55,5	100 100
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok yang mendapat pembinaan; Festival Pangan Lokal yang diikuti/diadakan	150 Kelompok	30 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	100%	10 Kelompok	40 Kelompok	26,67
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Penanganan Daerah Rawan pangan	100	16,67	16,67	16,67	100	16,67	33,33	33,33
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang terindikasi Rawan Pangan yang ditangani	30 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	100	5 Desa	10 desa	33,33%
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Investigasi Penanganan Kerawanan Pang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Kualitas Keamanan Pangan di Masyarakat	88%	90,77	88	91,21	104%	88	91,20	100,48
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keamanan Pangan Segar	88%	90,77	88	91,21	104%	88	91,20	100,48
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Laporan berkala pengembangan jaringan keamanan daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	60,00%
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis sampel yang diuji	50 Jenis Sampel	40 JenisSampel	10 Jenis	10 Jenis	100%	50 Jenis Sampel	50 JenisSampel	100,00%
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Media	20 Media	12 Media	4 Media	4 Media	100%	20 Media	16 Media	80,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2021, Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan telah ditentukan target dan cara pengukurannya sebagaimana tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Percepatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP)	Nilai	81	Total Skore Hasil penilaian Dari Tim Inspektorat Kabupaten
Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan)	Persen	133,5	Jumlah Pangan yang tersedia dibagi (Jumlah Penduduk x Kebutuhan Perkapita Tahunan)x 100%
	Skore Pola pangan harapan Ketersediaan	Score	97,15	PPH Ketersediaan dihitung menggunakan data ketersediaan energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH untuk dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat.
	Distribusi dan harga Pangan (Koefisien variasi Harga Pangan Beras)	Nilai	<10	Definisi koefisien variansi (CV) adalah perbandingan antara simpangan standar harga (STD) di tingkat produsen dengan nilai rata-rata (average) harga di tingkat produsen yang dinyatakan dengan persentase (%)
Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I	Persen	3,5	Persentase penanganan desa rentan pangan = Jumlah Desa rentan pangan yang ditangani / Jumlah Desa rentan pangan x 100 %
Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi (Persen)	Persen	88	Persentase keamanan dan mutu pangan segar =Jumlah sampel pangan yang aman / Jumlah sampel pangan yang diambil x 100 %
Pemenuhan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)	Persen	93	Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk

Hasil Pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021. Semua target kinerja dapat tercapai dengan baik. Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Percepatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP)	Nilai	85	78,97	92,91%	81	76,01	93,84%	Meningkat
Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan)	Persen	133,29	128,72	96,78	133,5	113,97	85,37%	Menurun
	Skore Pola pangan harapan Ketersediaan	Score	96,32	96,21	99,89	97,15	94,44	97,21	Menurun
Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I	Persen Persen	3,3	2,87	86,97	3,5	4,00	114,29	Meningkat
Pemenuhan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)	Skore	92,8	75,7	81,57	93,00	83,70	90,00%	Meningkat
Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi (Persen)	Persen	87	90,77	104,77	88,00	91,21	103,63%	Menurun

Pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas. Pada akhir Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan sebagaimana tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator :

1). Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kpt/th)

Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 mencapai 113,97% dari kebutuhan pangan seluruh penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, masih ada kelebihan sebanyak 13,97% dari kebutuhan. Pada Tahun 2021 Target Indikator Ketersediaan Pangan Utama sebesar 133,50 tercapai sebesar 113,97 atau sebesar 85,37%.

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021 untuk ketersediaan pangan utama mengalami penurunan sebesar 13,41 dimana capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 98,78%

2). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan

Capaian indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan di masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara ditargetkan sebesar 97,15. Sampai dengan akhir tahun 2021 tercapai sebesar 94,44 atau sebesar 91,21% dari target yang ditentukan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar 2,68%, dimana pada tahun 2020 capaian kinerja sebesar 99,89%

3). Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan pangan, dengan Indikator Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I.

Penanganan Daerah Rawan Pangan pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 3,5 %, tercapai 4% dengan capaian Kinerja sebesar 114,29%.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 27,32%, dimana pada tahun 2020 Capaian kinerja sebesar 86,97%.

2. Sasaran Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar.

1) Pemenuhan Pola Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan (Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2021 sebesar 83,7 dari target Tahun 2021 sebesar 93,00 atau tercapai sebesar 90%. Tidak tercapainya target angka PPH tahun 2021 akibat kurangnya pengetahuan masyarakat akan keanekaragaman konsumsi pangan. Dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 untuk Score PPH Konsumsi mengalami kenaikan sebesar 8,43%, dimana pada tahun 2020 PPH Konsumsi skor yang dicapai sebesar 75,7 dari target yang ditetapkan sebesar 92,8, atau dengan capaian sebesar 81,57%.

2) Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Keamanan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ketahanan pangan. Keamanan pangan telah banyak menjadi keprihatinan masyarakat dunia karena dampaknya terhadap kesehatan publik, dan bukan hanya itu masalah keamanan pangan jika dikombinasikan

dengan masalah gizi berdampak pada terhambatnya perkembangan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu penanganan masalah keamanan pangan harus dilakukan dan dimulai dari hal-hal yang paling dasar. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang keamanan pangan menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan keamanan pangan di masyarakat

Capaian kinerja Tingkat Penanganan Keamanan Pangan Segar pada tahun 2021 sebesar 91,21 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 88 dengan capaian Kinerja sebesar 103,63%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2020, mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 1,14%, dimana pada tahun 2020 Tingkat keamanan pangan segar sebesar 90,77 dari target yang ditetapkan sebesar 87 dengan capaian sebesar 104,77.

Secara Rinci Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C 30 berikut ini :

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Ketersediaan pangan utama Beras (%)			128,72	129,00	130,00	134,00	113,97	114,22	115,11	118,65	
2	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan)			96,48	96,48	97,89	98,59	94,44	94,44	95,82	96,51	
3	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita :											
	- Ketersediaan Energi			2365,00	2372,00	2378,00	2387,00	2241,00	2247,63	2253,32	2261,85	
	- Ketersediaan Protein			79,04	79,42	79,84	80,21	89,87	90,54	91,02	91,44	
4	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skore Pola pangan harapan PPH Konsumsi)			81,30	82,00	84,00	86,00	83,70	84,42	86,48	88,58	
5	Cakupan sarana dan Prasarana Pendukung Kemandirian pangan			6,00	9,00	10,00	10,00	1,00	14,00	10,00	10,00	
6	Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein											
	- Kecukupan Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)			1971,00	2050,00	2150,00	2175,00	1984,00	2050,00	2150,00	2175,00	
	- Kecukupan Konsumsi Protein (gram/kap/hari)			54,70	55,50	57,00	57,10	58,90	55,50	57,00	57,10	
7	Penanganan Kerawanan Pangan Pada Daerah Yang Terindikasi Rawan Pangan			3,00	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	
8	Cakupan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi (%)			90,77	90,77	91,00	91,50	91,21	91,21	91,44	91,94	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
Pembangunan Pangan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional, sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Ketahanan Pangan Merupakan Urusan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar. Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan, maka dilakukan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan.
Dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan penyesuaian penyesuaian terhadap Program dan Kegiatan dalam pembangunan ketahanan pangan.
2. Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Permasalahan utama pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Belum Optimalnya ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, Seimbang dan Aman yang diindikasikan dengan belum idealnya skore Pola Pangan Harapan (Score PPH). Permasalahan tersebut disebabkan :

- a. Sarana dan Prasaran pendukung Kemandirian Pangan Masih belum Memadai.
- b. Kualitas dan Kuantitas konsumsi Pangan Masyarakat masih belum beragam Bergizi dan seimbang. Masih tingginya konsumsi beras perkapita karena Perilaku masyarakat kabupaten Kutai Kartanegara yang masih cenderung sulit merubah pola makan ketergantungan akan beras ke (Pangan Alternatif)
- c. Adanya keterbatasan kemampuan pengembangan sumber pangan lokal dan pengolahan bahan pangan local sebagai sumber pangan alternatif.
- d. Pengetahuan akan diversifikasi konsumsi pangan (penganekaragaman konsumsi pangan) yang masih rendah, karena kurangnya sosialisasi, promosi dan advokasi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui media yang bisa digunakan.
- e. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan belum optimal. Belum adanya sinergitas kinerja diantara PD terkait dalam upaya penanganan kerawanan pangan, yang terdiri dari rawan : Ketersediaan Pangan, Rumah Tangga Miskin, Akses Jalan, Akses Listrik, Gizi Kurang, Akses Air Bersih dan Akses Fasilitas Kesehatan.
- f. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap keamanan pangan, terutama pangan segar, sehingga masih terdapat produk pangan segar yang tidak aman untuk dikonsumsi.

3. Visi Misi Bupati Kutai Kartanegara

Sebagaimana Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan Visinya **"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia"**, Dalam hal ini urusan Ketahanan Pangan berperan untuk mendukung **misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya**. Misi tersebut diintegrasikan kedalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah
Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya :

1. Penanganan daerah rawan pangan dan rentan rawan pangan dengan berbagai penyebab yang bervariasi, yang berpengaruh pada ketersediaan pangan. Penanganan daerah rawan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

2. Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan.

UU 23/2014 mengamanatkan pada Pemerintah dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

3. Kebutuhan Pangan untuk Kesehatan Masyarakat modern yang peduli Kesehatan.

Untuk memperoleh produk pangan yang bermutu baik dan terjamin bagi kesehatan, tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya penerangan pengendalian dan pengawasan dalam sistem jaminan mutu keamanan pangan.

4. Jaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Diterbitkannya Permentan Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan Dinas Ketahanan Pangan untuk meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan dalam hal sertifikasi jaminan mutu keamanan pangan.

Selain tantangan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki beberapa peluang yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan urusan pangan, yaitu :

1. Masih tersedia sumber daya alam yang belum termanfaatkan secara optimal untuk pengembangan dan penganekaragaman pangan local.
 2. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, serta organisasi masyarakat, Kelompok Wanita, yang memudahkan untuk sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran akan pangan beragam bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
 3. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.
 4. Potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
5. Isu – Isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dirumuskan sbb :

a. Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat daerah yang terindikasi rawan pangan karena beberapa penyebab, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya sinergisitas pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat.

b. Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.

c. Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih terdapat penggunaan bahan kimia yang berlebihan masih ditemukannya pangan segar yang mengandung bahan kimia melebihi batas minimal residu (BMR). Akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

d. Informasi Harga, Rantai Pasok, Jaringan Distribusi dan Sistem Logistik Daerah. Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait

distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan, sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 merupakan rancangan program kegiatan Renja satu tahun yaitu tahun 2023. Dalam Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan perkiraan kebutuhan. Setelah dilakukan reviuw dan analisa kebutuhan, terdapat perubahan kondisi yang mengharuskan adanya penyesuaian. Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yang tertuang dalam renja Awal terdiri dari 5 (Lima) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 10.877.786.621,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) setelah dilakukan reviu dan Analisa kebutuhan menjadi 5 (Lima) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 11.585.752.601,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Satu Rupiah).

Penyesuaian Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Ketahanan dilakukan untuk dapat mengakomodir Kepentingan Masyarakat, adanya komitmen Kepala Daerah dalam Pembangunan melalui DAK Fisik tahun 2022, dan agar Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal yang menyebabkan adanya penyesuaian Rancangan awal Renja Dinas Ketahanan Pangan, diantaranya karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian Anggaran Gaji ASN sesuai dengan hasil rekonsiliasi Gaji dengan BPKAD.
2. Adanya Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang selama ini belum mendapat anggaran, yaitu Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sangat penting dalam menyediakan dan memperbaharui data Kepegawaian.
3. Adanya Pengurangan Tenaga Harian Lepas yang mengundurkan Diri di Tahun 2022, sehingga alokasi anggarannya dialihkan untuk menunjang Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Secara Lengkap dapat dilihat dalam Matrik TC 31 sebagai berikut :

TABEL 4											
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023											
Kabupaten Kutai Kartanegara											
(TC-31)											
DINAS KETAHANAN PANGAN											
Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KAB KUKAR	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	7.677.786.621,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KAB KUKAR	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	8.385.752.601,00	
000.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 Dokumen	350.000.000,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	350.000.000,00	
000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	200.000.000,00	Target Kinerja disesuaikan
000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	
000.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	100.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	100.000.000,00	
000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Laporan	6.303.737.861,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Laporan	7.011.703.841,00	
000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB KUKAR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	6.223.737.861,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB KUKAR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	6.931.703.841,00	Anggaran disesuaikan dengan Hasil Rekonsiliasi Gaji dengan BPKAD
000.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	80.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	80.000.000,00	
000.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	12 Berkas	40.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	40.000.000,00	
000.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	40.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	40.000.000,00	
000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	350.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Layanan	350.000.000,00	
000.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.000.000,00	
000.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	
000.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB KUKAR	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB KUKAR	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB KUKAR	150 Laporan	150.000.000,00	
000.01.2.06.10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	75.000.000,00	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB KUKAR	1000 Dokumen	75.000.000,00	
000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	12 Bulan	559.048.760,00	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	KAB KUKAR	12 Bulan	559.048.760,00	
000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB KUKAR	12 Laporan	30.000.000,00	
000.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB KUKAR	4 Laporan	15.000.000,00	
000.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	514.048.760,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KAB KUKAR	12 Laporan	514.048.760,00	
000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	24 Unit Roda 2, 6 Unit Roda 4	75.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	KAB KUKAR	24 Unit Roda 2, 6 Unit Roda 4	75.000.000,00	
000.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB KUKAR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	2 Unit Roda 4	25.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	KAB KUKAR	2 Unit Roda 4	25.000.000,00	
000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB KUKAR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit Roda 2 dan 4 Unit Roda 4	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KAB KUKAR	24 Unit Roda 2 dan 4 Unit Roda 4	50.000.000,00	
2.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	KAB KUKAR	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2 Unit	750.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	KAB KUKAR	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2 Unit	3.200.000.000,00	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	KAB KUKAR	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	750.000.000,00	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	13 Unit	3.200.000.000,00	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Desa Sidomulyo Kec. Tabang	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 Unit	500.000.000,00	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak, Desa Rapak Lumbur Kecamatan Tonggarong dan Desa Cipar Makmur Kecamatan Muara Kaman	3 Unit	1.550.000.000,00	Untuk Mengakomodasi Usulan Masyarakat dalam menunjang Program Bupati
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Desa Maluhu Kec. Tenggara, Desa sidomulyo Kec. Anggara	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	2 Unit	200.000.000,00	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak, Desa Maluhu Kec. Tenggara, Desa sidomulyo Kec. Anggara, Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu, Desa Rapak Lumbur Kec. Tenggara, Desa Cipar Makmur Kec. Muara Kaman, Desa Bangun Rejo Kec. Tenggara Seberang, Desa Semangko Kec. Manang Raya	8 Unit	1.100.000.000,00	Untuk Mengakomodasi Usulan Masyarakat dalam menunjang Program Bupati

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang tersedia	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang tersedia			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang tersedia	Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong, Desa Cipat Makmur Kecamatan Muara Kaman	2 Unit	500.000.000,00	Untuk Mengakomodir Usulan Masyarakat dalam menunjang Program Bupati
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	KAB KUKAR	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	KAB KUKAR	1 Dokumen	50.000.000,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tersebar 18 Kecamatan	Kecukupan Konsumsi Energi Kecukupan Konsumsi Protein	1.780,00 55,200	1.650.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tersebar 18 Kecamatan	Kecukupan Konsumsi Energi Kecukupan Konsumsi Protein	1.780,00 55,200	2.300.000.000,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Tersebar 18 Kecamatan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	5	225.000.000,00	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Tersebar 18 Kecamatan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	5	225.000.000,00	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	KAB KUKAR	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Dokumen	75.000.000,00	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	KAB KUKAR	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen	75.000.000,00	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	KAB KUKAR	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2 Dokumen	50.000.000,00	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	KAB KUKAR	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2 Dokumen	50.000.000,00	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	TENGGARONG SEBERANG	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	100.000.000,00	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	TENGGARONG SEBERANG	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	100.000.000,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersebar 18 Kecamatan	Penguatan Cadangan pangan Pemerintah	50 Ton	600.000.000,00	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan pangan Pemerintah	Tersebar 18 Kecamatan	50 Ton	1.000.000.000,00	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Ton	600.000.000,00	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersebar 18 Kecamatan	50 Ton	600.000.000,00	
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Segihan Kecamatan Sebulu, Desa Gir Agung Kecamatan sebulu, Desa Kertabhuna Kec. Tenggarong Seberang, Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Desa Segihan Kecamatan Sebulu, Desa Gir Agung Kecamatan sebulu, Desa Kertabhuna Kec. Tenggarong Seberang, Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak	53 Ton	400.000.000,00	Untuk menindaklanjuti Pernyataan Komitmen Bupati Dalam rangka pengurangan DAK Fisik Tahun 2022 harus didukung pengisian lubang minimal 10% dan anggaran DAK tahun 2022 (Rp. 400.000.000,-)
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tersebar 18 Kecamatan	Peningkatan Pembinaan Pengankaragaman Konsumsi pangan	30 Kelompok	825.000.000,00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan Pembinaan Pengankaragaman Konsumsi pangan	Tersebar 18 Kecamatan	30 Kelompok	1.075.000.000,00	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	KAB KUKAR	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	150.000.000,00	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	KAB KUKAR	2 Dokumen	150.000.000,00	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Muara Kaman, Sebulu, Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Marang Kayu, Anggana, dan Tenggarong	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	15 Laporan	600.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Muara Kaman, Sebulu, Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Marang Kayu, Anggana, Tenggarong, Muara Jawa dan Sanga-Sanga, Kecamatan Samboja	17 Laporan	850.000.000,00	Untuk Mengakomodir Usulan Masyarakat dalam menunjang Program Bupati
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	KAB KUKAR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita Per Tahun	4 Laporan	75.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita Per Tahun	KAB KUKAR	4 Laporan	75.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	KAB KUKAR	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	5 Desa	500.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	KAB KUKAR	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	5 Desa	500.000.000,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	KAB KUKAR	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		100.000.000,00	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	KAB KUKAR	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Dokumen	100.000.000,00	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	KAB KUKAR	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	KAB KUKAR	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	100.000.000,00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Prosentase Penanganan Daerah Rawan pangan	20%	400.000.000,00	Penanganan Kerswanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan pangan Yang Tertangani	5 Desa/Kelurahan	400.000.000,00	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	100.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	100.000.000,00	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Enggalam kec. Muara Wis Desa Semayang Kec. Kenohan Desa Muai Kecamatan kembang Janggut Desa Sedulang Kecamatan Muara kaman Desa Muara Belinau Kecamatan Tabang	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	300.000.000,00	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Enggalam kec. Muara Wis Desa Semayang Kec. Kenohan Desa Muai Kecamatan kembang Janggut Desa Sedulang Kecamatan Muara kaman Desa Muara Belinau Kecamatan Tabang	5 Dokumen	300.000.000,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	KAB KUKAR	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	90,77	300.000.000,00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	KAB KUKAR	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	90,77	300.000.000,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Terciptanya Keamanan Pangan Segar	89	300.000.000,00	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Terciptanya Keamanan Pangan Segar	91	300.000.000,00	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Tenggaraong Seberang, Marang kayu, Kota Bangun, sebulu, Muara Jawa, Muara Badak	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	4 Dokumen	50.000.000,00	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Loa Kulu, Tenggaraong Seberang, Marang kayu, Kota Bangun, sebulu, Muara Jawa, Muara Badak	1 Dokumen	50.000.000,00	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggaraong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu, Samboja, Kota Bangun, Tenggaraong, Loa Janan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	50.000.000,00	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggaraong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu, Samboja, Kota Bangun, Tenggaraong, Loa Janan	1 Sertifikat	50.000.000,00	
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggaraong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu, Samboja, Kota Bangun, Tenggaraong, Loa Janan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.000.000,00	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggaraong Seberang, MuaraJawa,Sebulu,Marang Kayu, Samboja, Kota Bangun, Tenggaraong, Loa Janan	2 Dokumen	75.000.000,00	
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggaraong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu, Samboja, Kota Bangun, Tenggaraong, Loa Janan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Rekomendasi	50.000.000,00	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggaraong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu, Samboja, Kota Bangun, Tenggaraong, Loa Janan	4 Rekomendasi	50.000.000,00	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggaraong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu, Samboja, Kota Bangun, Tenggaraong, Loa Janan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	75.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggaraong Seberang, MuaraJawa,Sebulu,Marang Kayu, Samboja, Kota Bangun, Tenggaraong, Loa Janan	4 dokumen	75.000.000,00	
			TOTAL		10.877.786.521,00			TOTAL		14.685.752.601,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang didapat berdasarkan hasil Musrenbang baik di tingkat Kelurahan/Desa maupun ditingkat Kecamatan yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Adapun untuk tahun 2023 terdapat beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat dari Kecamatan terhadap Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Usulan Program dan Kegiatan diperoleh dari Aspirasi Masyarakat melalui usulan di SIPD maupun usulan yang disampaikan pada saat musrenbang di kecamatan masing-masing, serta usulan masyarakat melalui pokok pikiran anggota DPR

Tidak semua usulan masyarakat bisa diakomodir dalam Renja Perangkat daerah, usulan yang bisa diterima sebatas yang sesuai dengan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah, serta mendukung program prioritas kepala Daerah, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga program dan kegiatan usulan masyarakat yang sesuai prioritas Perangkat Daerah akan dibuat skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Usulan aspirasi masyarakat yang masuk ke Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel T-C 32.

TABEL : TC-32					
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN					
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA					
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
I.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				
I	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				
1.1.	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan				
1.	Pembangunan Lumbung Pangan	Dusun Utara RT.003 Desa Tanah Datar, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanah Datar	Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat	P = 10 M dan L = 10 M	Usulan Masyarakat melalui SIPD dan melalui Musrenbang Kecamatan, Sesuai Program dan Lokasi Prioritas Perangkat Daerah. Disetujui untuk Renja Tahun 2023 sepanjang kapasitas keuangan mencukupi.
2.	Pembangunan/Rehabilitasi Lumbung Pangan	Jln. Pertanian, DESA SEGIHAN Kab. Kutai Kartanegara	Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat	100 M2	Usulan masyarakat Melalui Musrenbang. Tidak masuk Lokasi prioritas, Karena Pada Tahun 2022 Sudah ada Pembangunan Lumbung Pangan di Desa Segihan
01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur				
1.	Pembangunan lantai jemur	Kelompok Tani Sumber Harapan Kel. Sungai Merdeka (Samboja)	Terbangunnya Lantai jemur	1 Unit	Usulan masyarakat Melalui Musrenbang, sesuai program dan kegiatan Perangkat Daerah, tetapi belum masuk Lokasi prioritas, Apabila ada pendanaan akan menjadi bahan pertimbangan untuk dimasukkan dalam Renja 2023
2.	Pembuatan Lantai jemur jagung	KM. 45 Kel. Bukit Merdeka (Samboja)	Terbangunnya Lantai jemur	1 Unit	Usulan masyarakat Melalui Musrenbang, sesuai program dan kegiatan Perangkat Daerah, tetapi belum masuk Lokasi prioritas, Apabila ada pendanaan akan menjadi bahan pertimbangan untuk dimasukkan dalam Renja 2023
3.	Pengadaan Mesin Pengering Jagung, Padi/Rotary Dryer kap	BUMDES Mulya Bersama Desa Mulawarman	Tersedianya Mesin pengering Jagung	1 Unit	Usulan masyarakat Melalui Musrenbang, sesuai program dan kegiatan Perangkat Daerah, tetapi belum masuk Lokasi prioritas, Apabila ada pendanaan akan menjadi bahan pertimbangan untuk dimasukkan dalam Renja 2023
4.	Pembuatan Lantai Jemur	Desa Semangko Marang Kayu	Terbangunnya Lantai jemur	1 Unit	Usulan masyarakat Melalui Musrenbang, sesuai program dan kegiatan Perangkat Daerah, masuk Lokasi prioritas, bisa dimasukkan dan rancangan Renja Tahun 2023.
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
02.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
1.	Pemanfaatan pekarangan Lestari (Kebon Etam) berupa Pembuatan Rumah Bibit, Bantuan Bibit Sayuran dan Saprodi untuk Skala Rumah tangga (Kelompok wanita, Dasa Wisma, PKK dll)	Desa Sedulang Kota Bangun	Terfaksananya Pemanfaatan Pekarangan	1 Paket	Masuk dalam program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah dan termasuk dalam Lokasi Prioritas, akan dimasukkan dalam Renja PD Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
2.	Bantuan Pengembangan Kegiatan Optimalisasi pemanfaatan Pekarangan, dengan konsep KRPL Kawasan Rumah pangan Lestari	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	1 Paket	Masuk dalam program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah dan belum termasuk dalam Lokasi Prioritas, dapat dipertimbangkan dimasukkan dalam Renja PD Tahun 2023
3.	Pelatihan Budi Daya dan Ketahanan Pangan	Pulau Harapan (Muara Muntai)	Terlaksananya Pelatihan Budidaya dan ketahanan Pangan	1 Paket	Masuk dalam program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah dan termasuk dalam Lokasi Prioritas, akan dimasukkan dalam Renja PD Tahun 2023
4.	Pelatihan Budidaya Sayuran dan Sarana Produksi	Kel. Jawa (Sanga-Sanga)	Terlaksananya Pelatihan Budidaya Sayuran dan tersedianya sarana produksi	20 Orang	Masuk dalam program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah dan termasuk dalam Lokasi Prioritas, akan dimasukkan dalam Renja PD Tahun 2023
5.	PENGADAAN BENIH SAYURAN KWT KEL PENDINGIN	Kel. Pendingin (Sanga-Sanga)	Tersedianya Benih Sayuran Untuk KWT	1 Paket	Masuk dalam program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah dan belum termasuk dalam Lokasi Prioritas, dapat dipertimbangkan dimasukkan dalam Renja PD Tahun 2023
6.	PELATIHAN HIDROPONIK SAYURAN UNTUK KWT KEL PENDINGIN	Kel. Pendingin (Sanga-Sanga)	Terlaksananya Pelatihan Sayuran untuk KWT	1 Paket	Masuk dalam program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah dan belum termasuk dalam Lokasi Prioritas, dapat dipertimbangkan dimasukkan dalam Renja PD Tahun 2023
7.	Pembuatan greenhouse hidroponik KWT DKM RT. 24 Kel. Sangasanga Dalam	Kel. Sangasanga Dalam (Sanga-Sanga)	Terbangunnya Green House Untuk KWT	1 Paket	Masuk dalam program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah dan belum termasuk dalam Lokasi Prioritas, dapat dipertimbangkan dimasukkan dalam Renja PD Tahun 2023
8.	Pelatihan hidroponik KWT RT. 04. 17. dan 24 Kel. Sangasanga Dalam	Kel. Sangasanga Dalam (Sanga-sanga)	Terlaksananya Pelatihan Sayuran Hidroponik untuk KWT	75 Orang	Masuk dalam program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah dan belum termasuk dalam Lokasi Prioritas, dapat dipertimbangkan dimasukkan dalam Renja PD Tahun 2023

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam memantapkan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara terintegrasi. Yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Kedaulatan pangan memberikan dukungan kekuatan dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang diarahkan untuk menyediakan beraneka ragam pangan dari produksi dalam negeri sesuai potensi sumber daya yang kita miliki. Ketersediaan pangan yang beraneka ragam akan mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 22/2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Permentan 43/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Serta Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur "Berani untuk Kaltim Berdaulat, pada Misi Kedua Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan Dengan demikian, dapat segera terwujud manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif.

Untuk meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat, program utama yang ditempuh Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Untuk tersebut dilaksanakan 4 (empat) kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan, yaitu:

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Untuk Tahun 2023 Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Fokus pada kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan
2. Peningkatan Keamanan Pangan
3. Penanganan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat wilayah, rumah tangga sampai dengan perseorangan/individu.

Sesuai dengan Visi Misi Bupati Terpilih, Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam **misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.**

Sesuai dengan Fokus dan sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Kedua tujuan Renja tersebut diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengatasi ancaman ketahanan pangan. Tujuan tersebut akan dijabarkan melalui sasaran Dinas Ketahanan Pangan

Adapun Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan target nilai tahun 2023 sebesar 78.
2. Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan) sebesar 130%.
3. Meningkatnya Pencapaian Score PPH ketersediaan dengan target score tahun 2023 sebesar 97,89.
4. Meningkatnya ketersediaan pangan daerah, yang ditunjukkan dengan Tercapainya ketersediaan energi sesuai standar sebesar 2378 kkal/kapita, serta ketersediaan protein sebesar 79,81 gram/perkapita pada tahun 2023.
5. Menurunnya jumlah desa/kelurahan yang terindikasi rawan pangan sebanyak 5 desa per tahun.
6. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan dengan skore PPh 84
7. Tercapainya tingkat keamanan pangan segar sebesar 91% pada tahun 2023

Berikut penjabaran atas keselarasan misi yang diemban, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR / SASARAN TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,01	77	78	79	80	81	81
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah		Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	%	128,72	129,00	130,00	134,00	137,00	140,00	140,00
			Skore Pola pangan harapan Ketersediaan	Skore	96,48	96,48	97,89	98,59	99,30	100,00	100,00
		Meningkatnya Ketersedian Pangan Daerah	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita								
			- Ketersediaan Energi	kkal/kapita /hari	2365	2372	2378	2387	2392	2400	2400
			- Ketersediaan Protein	gr/kapita/ hari	79,04	79,42	79,81	80,20	80,58	80,97	80,97
		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (skor PPH) Konsumsi	Skor	81,30	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana program prioritas beserta kegiatannya disajikan berdasarkan identifikasi dan telaahan terhadap sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yang menjadi urusan Dinas Ketahanan Pangan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung visi misi Bupati menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023, sehingga sinergitas antara sasaran pembangunan yang tertuang dalam Sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah dengan Renja Dinas Ketahanan Pangan sesuai Permendagri No 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No 050 Tahun 2020 dapat diwujudkan.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Meliputi :
 - Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terutama misi kedua **misi 2 : "Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.**
 - Pengentasan Kemiskinan pada daerah rawan dan rentan pangan
 - Peningkatan Kualitas konsumsi pangan Daerah dengan pemberdayaan Masyarakat.
 - Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan
 - Peningkatan Keamanan pangan
 - Pencapaian Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- Sesuai hasil analisis terhadap program dan kegiatan, sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 sebanyak 5 (Lima) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan, dengan Rencana Anggaran sebesar Rp.11.585.752.601,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Satu Rupiah), secara garis besar dapat diuraikan sebagai mana tabel berikut :

RINGKASAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN		
DINAS KETAHANAN PANGAN		
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
TAHUN 2023		
Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
0,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.385.752.601,00
000.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000,00
000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000
000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00
000.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00
000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.011.703.841,00
000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.931.703.841,00
000.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	80.000.000,00
000.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000,00
000.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000,00
000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.000.000,00
000.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000,00
000.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00
000.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00
000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00
000.01.2.06.10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000.000,00

Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	559.048.760,00
000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00
000.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00
000.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.048.760,00
000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000,00
000.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00
000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00
2,9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	3.200.000.000,00
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	3.200.000.000,00
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.550.000.000,00
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur	1.100.000.000,00
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	500.000.000,00
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	50.000.000,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.300.000.000,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	225.000.000,00
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	75.000.000,00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	50.000.000,00
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	100.000.000,00

Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	600.000.000,00
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	400.000.000,00
2.09.03.2.04	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	1.075.000.000,00
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	150.000.000,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	850.000.000,00
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	75.000.000,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	500.000.000,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100.000.000,00
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100.000.000,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000,00
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	300.000.000,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00
		14.685.752.601,00

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Semua Program dan kegiatan dalam renja awal ini telah disesuaikan dengan program dan kegiatan sesuai Permendagri No 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050 tahun 2021, demikian juga untuk pagu anggarannya. Namun demikian setelah dilaksanakan sinkronisasi dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, disusun sekala prioritas sehingga rancangan renja Dinas Ketahanan Pangan mengalami pergeseran, karena menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

Rencana Anggaran pada Renja akhir sebesar Rp. 14.685.752.601,00 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Satu Rupiah) dengan prioritas

- Pembayaran gaji ASN.
- Kegiatan Generik (operasional kantor)
- Pengentasan Kemiskinan
- Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5 (TC 33) sebagaimana berikut.

TABEL : 5 (TC-33)									
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023									
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024									
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023(N)					Rencana Tahun 2024(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	KAB KUKAR	78	8.385.752.601,00			79	7.677.786.621,00
000.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	KAB KUKAR	12 Dokumen	350.000.000,00			16 Dokumen	350.000.000,00
000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	2 Dokumen	200.000.000	APBD KAB	Target Kinerja disesuaikan	6 Dokumen	200.000.000,00
000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB KUKAR	5 Laporan	50.000.000,00	APBD KAB		5 Laporan	50.000.000,00
000.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUKAR	5 Laporan	100.000.000,00	APBD KAB		5 Laporan	100.000.000,00
000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	KAB KUKAR	12 Laporan	7.011.703.841,00			12 Laporan	6.303.737.861,00
000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KAB KUKAR	54 Orang/bulan	6.931.703.841	APBD KAB	Anggaran disesuaikan dengan Hasil Rekonsiliasi Gaji dengan BPKAD	54 Orang/bulan	6.223.737.861,00
000.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	KAB KUKAR	12 Laporan	80.000.000	APBD KAB		12 Laporan	80.000.000,00
000.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	KAB KUKAR	12 Dokumen	40.000.000,00			12 Dokumen	40.000.000,00
000.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUKAR	12 Laporan	40.000.000,00	APBD KAB		12 Laporan	40.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023(N)					Rencana Tahun 2024(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB KUKAR	12 Layanan	350.000.000,00			12 Layanan	350.000.000,00
000.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB KUKAR	2 Paket	55.000.000,00	APBD KAB		1 Paket	55.000.000,00
000.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KAB KUKAR	2 Paket	50.000.000,00	APBD KAB		2 Paket	50.000.000,00
000.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KAB KUKAR	3 Paket	20.000.000,00	APBD KAB		3 Paket	20.000.000,00
000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB KUKAR	150 Laporan	150.000.000,00	APBD KAB		150 Laporan	150.000.000,00
000.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB KUKAR	1000 Dokumen	75.000.000,00	APBD KAB		1000 Dokumen	75.000.000,00
000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	KAB KUKAR	12 Bulan	559.048.760,00			12 Bulan	559.048.760,00
000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB KUKAR	12 Laporan	30.000.000,00	APBD KAB		12 Laporan	30.000.000,00
000.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB KUKAR	4 Laporan	15.000.000,00	APBD KAB		4 Laporan	15.000.000,00
000.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KAB KUKAR	12 Laporan	514.048.760	APBD KAB		12 Laporan	514.048.760,00
000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	KAB KUKAR	30 Unit	75.000.000,00			30 Unit	75.000.000,00
000.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	KAB KUKAR	2 Unit	25.000.000,00	APBD KAB		2 Unit	25.000.000,00
000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KAB KUKAR	28 Unit	50.000.000,00	APBD KAB		28 Unit	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023(N)					Rencana Tahun 2024(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		10 Unit	3.200.000.000,00			10 Unit	750.000.000,00
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	13 Unit	3.200.000.000,00			10 Unit	750.000.000,00
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak, Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong dan Desa Cipan Makmur Kecamatan Muara Kaman	3 Unit	1.550.000.000,00	APBD KAB	Untuk Mengakomodir Usulan Masyarakat dalam menunjang Program Bupati	3 Unit	500.000.000,00
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur	Jumlah Lantaijemur yang Tersedia	Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak, Desa Maluhu Kec. Tenggarong, Desa sidomulyo Kec. Anggana, Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu, Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong, Desa Cipan Makmur Kec. Muara Kaman, Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang, Desa Semangko Kec. Marang Kayu	8 Unit	1.100.000.000,00	APBD KAB	Untuk Mengakomodir Usulan Masyarakat dalam menunjang Program Bupati	6 Unit	200.000.000,00
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong, Desa Cipan Makmur Kecamatan Muara Kaman	2 Unit	500.000.000,00	APBD KAB	Untuk Mengakomodir Usulan Masyarakat dalam menunjang Program Bupati		
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	KAB KUKAR	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD KAB		1 Dokumen	50.000.000,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi Kecukupan Konsumsi Protein	Tersebar 18 Kecamatan	2150 kkal/kap/hari 57 Gram/kap/hari	2.300.000.000,00			2175 57,1	1.650.000.000,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	Tersebar 18 Kecamatan	5 Persen	225.000.000,00			<5	225.000.000,00
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	KAB KUKAR	1 Laporan	75.000.000,00	APBD KAB		2 Dokumen	75.000.000,00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	KAB KUKAR	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD KAB		2 Dokumen	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023(N)					Rencana Tahun 2024(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Desa Manunggal Jaya Kecamatan tenggarong Seberang	1 Unit	100.000.000,00	APBD KAB		1 Unit	100.000.000,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan pangan Pemerintah	Tersebar 18 Kecamatan	50 Ton	1.000.000.000,00			50 Ton	600.000.000,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersebar 18 Kecamatan	50 Ton	600.000.000,00	APBD KAB		50 Ton	600.000.000,00
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Desa Segihan Kecamatan Sebulu, Desa Giri Agung Kecamatan sebulu, Desa Kertabhuna Kec. Tenggarong Seberang, Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak	53 Ton	400.000.000,00	APBD KAB	Untuk menindaklanjuti Pernyataan Komitmen Bupati Dalam rangka pembangunan DAK Fisik Tahun 2022 harus didukung pengisian lumbung minimal 10% dari anggaran DAK tahun 2022 (Rp. 400.000.000,-)		
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi pangan	Tersebar 18 Kecamatan	30 Kelompok	1.075.000.000,00			30 Kelompok	825.000.000,00
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	KAB KUKAR	2 Dokumen	150.000.000,00	APBD KAB		2 Dokumen	150.000.000,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Muara Kaman , Sebulu, Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan , Kembang Janggut, Tabang , Marang Kayu, Anggana, Tenggarong, Muara Jawa dan Sanga-Sanga, Kecamatan Samboja	17 Laporan	850.000.000,00	APBD KAB	Untuk Mengakomodir Usulan Masyarakat dalam menunjang Program Bupati	15 Laporan	600.000.000,00
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	KAB KUKAR	4 Laporan	75.000.000,00	APBD KAB		4 Laporan	75.000.000,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	KAB KUKAR	5 Desa	500.000.000,00			5 Desa	500.000.000,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	KAB KUKAR	1 Dokumen	100.000.000,00			1 Dokumen	100.000.000,00
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	KAB KUKAR	2 Dokumen	100.000.000,00	APBD KAB		1 Dokumen	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023(N)					Rencana Tahun 2024(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan pangan Yang Tertangani	KAB KUKAR	5 Desa/Kelurahan	400.000.000,00			5 Desa	400.000.000,00
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	4 Laporan	100.000.000,00	APBD KAB		4 Laporan	100.000.000,00
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Desa Enggalam kec. Muara Wis Desa Semayang Kec. Kenohan Desa Muai Kecamatan kembang Janggut Desa Sedulang Kecamatan Muara kaman Desa Muara Belinau Kecamatan Tabang	5 Dokumen	300.000.000,00	APBD KAB		4 Dokumen	300.000.000,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	KAB KUKAR	90,77	300.000.000,00			91,5	300.000.000,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Keamanan Pangan Segar	KAB KUKAR	91	300.000.000,00			89	300.000.000,00
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Marang kayu, Kota Bangun, sebulu, Muara Jawa , Muara Badak	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD KAB		4 Dokumen	50.000.000,00
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu. Samboja , Kota Bangun, Tenggarong, Loa Janan	1 Sertifikat	50.000.000,00	APBD KAB		1 Sertifikat	50.000.000,00
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu. Samboja , Kota Bangun, Tenggarong, Loa Janan	2 Dokumen	75.000.000,00	APBD KAB		2 Dokumen	75.000.000,00
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu. Samboja , Kota Bangun, Tenggarong, Loa Janan	4 Dokumen	50.000.000,00	APBD KAB		4 Dokumen	50.000.000,00
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu. Samboja , Kota Bangun, Tenggarong, Loa Janan	4 dokumen	75.000.000,00	APBD KAB		4 dokumen	75.000.000,00
			TOTAL		14.685.752.601,00				10.877.786.621,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan terutama peningkatan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

- A. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan nya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka pelaksanaan renja yang telah disusun dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan di Kutai Kartanegara visi dan misi Kepala Daerah, dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan seluruh Stakeholder. Apabila didalam pelaksanaannya anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan.

- B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 berpedoman pada :

- 1) Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2021,
- 2) Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026.

- C. Rencana Tindak Lanjut.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta efisiensi anggaran dalam menunjang pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di masing-masing bidang untuk tahun berjalan, sehingga apabila terjadi perubahan terkait

ketersediaan anggaran dan lainnya bisa segera disesuaikan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kesiapan bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga Renja 2023 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan Ketahanan Pangan

Tenggarong, 10 Agustus 2022
Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Plt. Kepala Dinas



Wiyono, S.IP., M.Si
NIP. 19690204 199003 1 002